

PENEGAKAN HUKUM OLEH KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA NO.582./PID.SUS/2023/PN.PDG

(Fitri Ramadhani, 21150011, Fakultas Hukum Ilmu Sosial, dan Humaniora, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Dharma Andalas, 60 Halaman, Tahun 2025)

ABSTRAK

Kasus penyalahgunaan narkotika terus meningkat menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Pengguna Narkotika dari Tahun 2020-2022 mengalami peningkatan yaitu dari 833 kasus menjadi 879 kasus. Berdasarkan data terbaru dari Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2023, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mencatat sebanyak 65 ribu warganya terjerat kasus narkotika. Angka ini menempatkan Sumbar di peringkat ke-6 tertinggi dalam kasus narkotika di Indonesia. Karena itu di perlukan upaya yang serius dari berbagai pihak untuk menyikapi masalah ini salah satu kasus terkait dengan narkotika yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat adalah Perkara No. 582/Pid.Sus./2023/Pn.Pdg. Berdasarkan hasil dari pembahasan adapun rumusan masalah dalam penulisan ini meliputi: 1) Apa yang menjadi dasar terdakwa tidak di dakwakan sebagai penyalahgunaan narkotika; 2) Bagaimana upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk mengurangi peredaran narkotika. Untuk menjawab persoalan tersebut digunakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan teknik wawancara menggunakan model wawancara semi terstruktur. Jenis pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dan dapat disimpulkan 1) dasar pertimbangan Jaksa dalam perkara No. 582/Pid.Sus./2023/Pn.Pdg adalah Pasal 114 ayat (1) dan SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi; 2) upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk mengurangi peredaran narkotika dengan cara melakukan sosialisasi kemsayarakat dan sekolah-sekolah, melakukan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika dan memberikan pelatihan sehingga korban penyalahgunaan narkotika tersebut mempunyai *skill* untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kata Kunci: Narkotika, Jaksa, Penegakan Hukum

**LAW ENFORCEMENT BY THE WEST SUMATRA HIGH PROSECUTOR'S OFFICE
AGAINST NARCOTICS CRIMINAL CASE NO. 582/PID.SUS/2023/PN.PDG**

(Fitri Ramadhani, 21150011, Faculty of Law, Social and Political Sciences, Law Program, Dharma Andalas University, 60 Pages, Year 2025)

ABSTRACT

The misuse of narcotics continues to rise, as reported by the National Narcotics Agency (BNN) of Indonesia. Narcotics cases from 2020 to 2022 increased from 833 to 879 cases. According to the latest data from BNN in 2023, the province of West Sumatra recorded 65 thousand of its residents involved in narcotics cases. This number places West Sumatra sixth in the highest narcotics cases in Indonesia. Therefore, serious efforts from various parties are required to address this issue. One such case handled by the High Prosecutor's Office of West Sumatra is Case No. 582/Pid.Sus/2023/Pn.Pdg. Based on the results of the discussion, the research questions in this study include: 1) What was the basis for not prosecuting the defendant as a narcotics abuser? 2) What preventive measures can the High Prosecutor's Office of West Sumatra take to reduce the circulation of narcotics? To answer these questions, the study uses an Empirical Legal research method with semi-structured interviews. The approach used is a case study, and it can be concluded that: 1) The prosecutor's consideration in case No. 582/Pid.Sus/2023/Pn.Pdg was based on Article 114 paragraph (1) of the Narcotics Law and Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 4 of 2010 regarding the placement of narcotics abusers, victims, and addicts into rehabilitation institutions; 2) Preventive measures that the High Prosecutor's Office of West Sumatra can take to reduce narcotics circulation include conducting socialization to the public and schools, implementing rehabilitation for narcotics abusers, and providing training so that narcotics abuse victims can acquire skills to meet their life needs.

Keywords: Narcotics, Prosecutor, law enforcement